

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu)

Endang Siti Rukmana Lapi¹, Slamet Muchsin², Suyeno³

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Jl. MT

Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

LPPM Unisma Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

E-mail: memeendang96@gmail.com

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan upaya untuk memaparkan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi dana yang dialokasikan oleh pusat, provinsi, maupun kabupaten kepada desa melalui ADD tersebut memberi dampak positif terhadap pembangunan desa ataupun upaya kesejahteraan masyarakat di Desa Oro-Oro Ombo. Alokasi dana desa ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Pada penelitian metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif (Interactive model) dari Milles and Hubberman dan Saldana (1992).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintahan Desa Sukamahi. Selain itu, untuk mengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Sukamahi dalam melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Serta untuk mengetahui sejauh mana Islam mengatur tentang Alokasi Dana Desa. Upaya yang dilakukan oleh aparat Desa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan melaksanakan berbagai program pemerintah agar dapat membuat masyarakat lebih produktif lagi dalam memanfaatkan potensi desa yang dapat dimanfaatkan.

Berkaitan dengan hasil penelitian yang sudah peneliti jelaskan, maka saran yang dapat peneliti berikan yaitu untuk ditingkatkannya kualitas sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat dan menambah sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci : Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan pencerahan bagi pemerintah, terutama bagi pemerintah desa dan masyarakat desa. Munculnya Undang-undang desa memberikan ruang yang lebih leluasa dalam menjalankan pemerintah desa, mengembangkan potensi desa, melakukan inovasi dan kreasi sesuai dengan kebutuhan desa, dan mengurus urusan desa dan kebutuhan desa sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat desa.

Desa merupakan wilayah yang mempunyai potensi alam yang besar. Dari sumber daya alam tersebut,

dapat dijadikan sebagai sumber bahan makanan dan bahan mentah. Sumberdaya alam yang dimiliki desa inilah yang dapat dijadikan pendorong untuk meningkatkan pembangunan ekonomi secara nasional. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem ekonomi rakyat yang terbukti bisa menopang perekonomian nasional bahkan pada saat krisis, namun kenyataannya kebanyakan desa di Indonesia merupakan desa tertinggal, maka dari itu pemerintah melakukan berbagai pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat.

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atau struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpang pendapatan, serta pengentasan kemiskinan, sedangkan hakikat pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian suatu sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keberagaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada didalamnya, untuk bergerak maju untuk menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara spiritual maupun material.

Perekonomian desa dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program, namun upaya itu kurang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru akan menghambat daya kreatifitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan perekonomian didesanya. Mekanisme kelembagaan ekonomi dipedesaan tidak berjalan secara efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan hal itulah, seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat desa. Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa harus dipandang sebagai upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa melalui koordinasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan ekonomi desa, baik ditingkat pusat, propinsi maupun tingkat kabupaten sehingga efektifitasnya memiliki signifikansi yang besar terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Berangkat dari dibentuknya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dimana desa dituntut mandiri sehingga bisa membiayai desanya sendiri dengan usaha-usaha yang digerakkan dari desa, pemerintah hanya memberikan stimulus-stimulus guna mendorong kemandirian desa. Sesuai dengan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, ayat 12 yang berisi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat,

kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.

Adapun fenomena yang terjadi pada pengelolaan Dana Desa di Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu menurut Bapak Supriono selaku perangkat desa kasi pemerintahan masih belum berjalan dengan optimal, sehingga dapat mempengaruhi tingkat kualitas pengelolaan dana desa tersebut. Pengelolaan Dana Desa di Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu masih kurang optimal dikarenakan adanya kendala-kendala untuk mencapai kualitas yang baik. Berdasarkan hasil wawancara terdapat kendala yaitu Sumberdaya Manusia, yang disebabkan oleh pengaruh dari budaya kebiasaan misalnya dari masyarakat desa menjadi masyarakat yang lebih modern sehingga itu dianggap tidak konsumtif, dan ketidaksiapan dari sumberdaya manusia untuk alih profesi dari pertanian ke pariwisata.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian dana desa agar bisa sesempurna gagasan inisiatornya.

Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumberdaya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya didalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut dibutuhkan pemerintahan yang kuat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi yang kerakyatan tanpa menghilangkan karakter dari sifat pedesaan, maka diperlukan adanya pemebdayaan atau pengelolaan ekonomi yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat. Yang diperlukan bagi pelaksana pembangunan itu adanya organisasi ekonomi atau badan perekonomian yang dapat menarik perhatian dan kepercayaan masyarakat desa untuk menggerakkan roda potensi ekonomi yang telah ada agar pendapatan masyarakat meningkat dari penyisihan pendapatan tersebut dapat berbentuk modal, dan dengan modal yang ada masyarakat dapat melakukan pembangunan di desanya.

2. METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagaimana bagian dari sesuatu keutuhan.

Metode penelitian yang diambil penulis pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif karena data yang penulis kumpulkan adalah data bentuk kata-kata, kalimat, maupun pencatatan dokumen dengan studi yang mengkaji Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Batu Kecamatan Batu Kota Batu.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dilakukan pada awal penelitian karena fokus penelitian memberikan batasan-batasan hal yang diteliti. Fokus penelitian berfungsi memberikan arahan selama proses penelitian, khususnya pada proses pengumpulan data untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian.

Menurut Moleong (1994:62), penetapan fokus dapat membatasi studi yang berarti dengan adanya fokus, penentuan fokus penelitian dan tempat penelitian menjadi lebih layak dan penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi dalam menjangkau informasi yang masuk atau keluar. Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah:

1. Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu dengan sub fokus:
 - a. Deskripsi langkah-langkah implementasi kebijakan pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat
 - b. Model implementasi kebijakan pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu, dengan unit analisisnya adalah implementasi alokasi

dana desa. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk memfokuskan ruang lingkup pembahasan. Dipilihnya Desa Oro-Oro Ombo sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan:

- a. Partisipasi masyarakat dalam Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat
- b. Dilokasi tersebut memungkinkan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan karena lokasi tersebut mudah dijangkau

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat dengan menggunakan wawancara melalui daftar pertanyaan kepada narasumbernya. Dalam penelitian ini dipilih pihak-pihak yang terkait dengan Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat baik dari unsur pemerintah ataupun masyarakat setempat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari Kantor Desa Oro-Oro Ombo berupa keterangan-keterangan serta laporan-laporan atau dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan, yang menjadi sumber penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat salah satunya adalah data APBDes. Dan diluar desa Oro-oro Ombo peneliti menggunakan studi daftar pustaka melalui buku, karya ilmiah, dokumen-dokumen, gambar, catatan-catatan, arsip, artikel dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis dengan fenomena-fenomena yang diteliti. Metode ini paling banyak digunakan dalam berbagai aktifitas kehidupan. Secara khusus observasi adalah mengamati dan mendengarkan untuk mencari jawaban, dengan cara mencatat, merekam, dan memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.

b. Wawancara

Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara mendalam antara peneliti dengan responden tentang persoalan atau

fokus penelitian. Wawancara juga sering disebut dengan *interview*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara dalam bentuk *interview* bebas terpimpin. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan bahan yang berupa data dari dokumen baik berupa catatan, tabel-tabel, gambar-gambar, serta dokumen dalam bentuk lain yang hubungannya dengan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki menggunakan benda-benda tertulis seperti buku, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

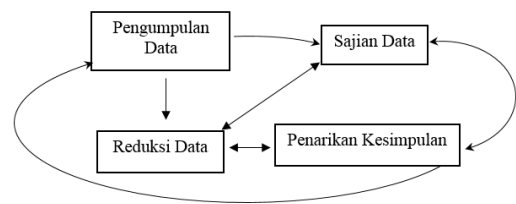
F. Keabsahan Data

Ada 4 teknik penelitian yang dapat dipergunakan dalam menempatkan keabsahan data yaitu:

1. Kepercayaan (*credibility*)
Untuk memperhatikan derajat kepercayaan temuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.
2. Keteralihan (*Transferability*)
Merupakan proses empiris yang tergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima untuk melakukan pengalihan tersebut, penelitian akan mencari data dan mengumpulkan dalam konteks yang berhubungan dengan pengolahan data pada lembaga pemerintah tersebut.
3. Ketergantungan (*Dependability*)
Ketergantungan dilihat dari istilah konvensional dapat disebut sebagai reabilitas. Reabilitas merupakan syarat bagi validitas, hanya dengan alat yang *reliable*, maka akan diperoleh data yang *valid*.
4. Kepastian (*Confirmability*)
Dalam menentukan kepastian penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitilah yang menjadi sumber utama. Selain itu peneliti juga melakukan diskusi secara *kontinew* dengan dosen pembimbing.

G. Analisis Data

Teknik analisa data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Mode interaktif ini terdiri dari tiga hal utama : (1) Reduksi data; (2) Penyajian data; dan (3) Penarikan Kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data.



Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman (1992)

(Sumber: Muhammad Idrus, 2009)

Berikut penjelasan Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman:

(1) Pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal.

(2) Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung, dan hingga laporan akhir penelitian lengkap dapat tersusun.

(3) Penyajian Data

Penyajian data dimaknai oleh Miles dan Huberman dalam Idrus (2009:110) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Proses penyajian data belum berakhir sebelum laporan akhir penelitian lengkap dapat tersusun sehingga kegiatan display tidak boleh berhenti sebelum yakin bahwa semua yang seharusnya diteliti telah dipaparkan atau disajikan.

(4) Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Proses verifikasi hasil temuan dapat berlangsung singkat dan dilakukan oleh peneliti sendiri, yaitu dilakukan secara selintas dengan mengingat hasil-hasil temuan terdahulu dan melakukan cek silang (*cross check*) dengan temuan lainnya.

3. PEMBAHASAN

A. Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Oro-Oro Ombo

a. Perencanaan Dana yang ada di Desa Oro-Oro Ombo

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif tentang Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa

Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Sehingga peneliti kemudian mencari data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Berdasarkan data dokumen APBDes Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu tahun 2019 Pencairan dana sampai bulan ini masih 25% dari keseluruhan, hal tersebut dikarenakan harus adaptasi dengan regulasi atau aturan yang baru serta Permendagri yang baru yaitu tahun 2018. Sehingga aparat desa harus mempelajari dalam pengelolaan berkas keuangan dan akan membutuhkan waktu yang lama sehingga dapat menghambat proses pencairan dana. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai program pemerintah yang tujuannya untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Oro-Oro Ombo yaitu Bapak Wiweko tentang Alokasi Dana Desa, dapat disimpulkan bahwa jika Pendapatan APBDes selalu meningkat dari tahun ke tahun maka perencanaan dana APBDDes akan dengan mudah disusun dan dalam menjalankan program-program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dan mengembangkan potensi yang ada di Desa Oro-Oro Ombo.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Oro-Oro Ombo

Berdasarkan data yang ada di Desa Oro-Oro Ombo tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat, terdapat empat program yaitu Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Bidang UMKM, dan Bidang Penanaman Modal BUMDES

Pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Sumber daya manusia adalah kekayaan yang terpenting, yang dimiliki suatu organisasi. Sumber daya juga disebut sebagai sebuah tenaga, keahlian, kemampuan yang dimiliki manusia. Untuk itu perlu diadakannya pengembangan sumber daya manusia dengan tujuan meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai, menghilangkan kinerja buruk, meningkatkan produktivitas dan sebagainya Siagian (2008:124).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jika aparat desa telah berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat Desa Oro-Oro Ombo melalui berbagai program pemerintah. Maka akan dapat memperbaiki kualitas sumberdaya manusia dan mengembangkan desa sehingga dapat memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat Desa Oro-Oro Ombo.

c. Model Implementasi Top-Down

Model implementasi yang saya gunakan dalam penyelesaian skripsi ini adalah model pendekatan *Top-Down* (model rasional) digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat implementasi sukses. Meter dan Horn (1978) berpandangan bahwa dalam implementasi kebijakan perlu pertimbangan isi dan tipe kebijakan. Ia juga memandang implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang oleh individu-individu / pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa, jika tujuan kebijakan dana desa yaitu untuk pemberdayaan masyarakat, maka akan mampu meningkatkan kualitas proses perencanaan desa dan mendukung kegiatan ekonomi. Untuk aturan kebijakan yang mendukung terlaksananya program yaitu UUD Desa No. 6 Tahun 2014, Permendagri No. 47 2015, dan Permendagri No. 20 2018, untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program yaitu Kasi Kesra, RT/RW, serta tokoh-tokoh masyarakat, untuk setiap programnya diketuai oleh Bapak Hariyono, sikap pemimpin yang ada di Desa Oro-Oro Ombo Bapak Wiweko yaitu beliau termasuk orang yang Bijaksana dalam menyikapi segala persoalan, sabar dalam menghadapi bawahan dan masyarakat, bersikap transparan kepada masyarakat dan selalu ikut andil dalam setiap program. Untuk kondisi ekonomi masyarakat Desa Oro-Oro Ombo sendiri, banyak sekali potensi yang dapat dikembangkan, masyarakat banyak yang memanfaatkan potensi pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, banyak yang memanfaatkan di bidang UMKM juga.

d. Alur Pencairan Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Untuk mewujudkan apa yang menjadi kewajiban desa dan hak masyarakat desa tersebut maka sangat diperlukan tersedianya dana. Salah satunya yaitu Alokasi Dana Desa. Maksud Alokasi Dana Desa yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintahan Kota Batu kepada pemerintah desa yang berasal dari anggaran pendapatan Kota Batu, dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Oro-Oro Ombo yaitu Bapak Wiweko, dapat disimpulkan bahwa jika pencairan dana telah 100% maka semua program yang telah dibuat oleh Desa Oro-Oro Ombo

bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat.

e. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa jika pendapatan Dana di Desa Oro-Oro Ombo setiap tahunnya selalu meningkat maka akan dapat dipergunakan untuk berbagai program, dalam tahun ini ada lima program yaitu Penyelenggaraan Pemerintah, Pembinaan Kemasyarakatan, Pelaksanaan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Darurat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Dalam pengelolaan tersebut di setiap tahap pengelolaannya juga dilihat keberjalanan proses pemberdayaan sehingga akan tampak sejauh mana keberhasilan pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Oro-Oro Ombo.

f. Kebijakan Dan Strategi Dalam Pencapaian Tujuan

Strategi pencapaian desa mandiri, partisipatif dan berdaya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilakukan dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan dengan strategi partisipatif dalam pemerintahan desa yang baik.

Kebijakan dan strategi dibuat berdasarkan kondisi keadaan Desa Oro-Oro Ombo, sehingga pihak aparat dapat dengan mudah dalam menyusun kebijakan dan strategi yang dibutuhkan oleh Masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang ada dalam memajukan desa dan untuk kemajuan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa jika keberhasilan suatu rencana pemerintahan tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor penentu yang akan menentukan tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Maka Desa Oro-Oro Ombo sendiri sudah membuat kebijakan dan strategi yang sebaik mungkin dalam pelaksanaan berbagai program pemerintahan agar Desa Oro-Oro Ombo dapat berhasil dalam setiap programnya.

B. Faktor Pendukung & Penghambat dalam Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan

pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Oro-Oro Ombo, Bapak wiweko memaparkan tentang faktor pendukung yang dapat mendukung berlangsungnya program kegiatan yang ada di Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu yaitu:

1. Memaksimalkan potensi yang ada, dari segi sumber daya alam, letak objek wisata yang strategis, budaya dan lingkungan objek wisata
2. Peran pemerintah dalam mengawal, memfasilitasi dan mempromosikan objek wisata khususnya Desa Wisata dari Pemerintah Kota Batu.
3. Kesadaran Masyarakat dan Pemerintah untuk memelihara, melindungi, menjaga dan merawat lingkungan alam dengan mengembangkan Desa Wisata sebagai kegiatan wisata alternatif.
4. Kondisi alam, Desa Oro-Oro Ombo memiliki Kondisi alam berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan yang dipadukan dengan pemandangan alam yang indah, suhu udara yang relatif sejuk, potensi alam yang dimiliki seperti air terjun, hamparan sawah, dan perkebunan.
5. Terdapat objek daya tarik wisata yang ada di Kota Batu dan sedang dikembangkan untuk mendukung Kota Batu sebagai Kota Wisata.
6. Industri pariwisata yang berkembang di Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu.
7. Masyarakat yang mendukung industri pariwisata dapat meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan mereka, seperti melalui makanan dan minuman khas yang dibuat oleh masyarakat, kerajinan yang beragam khas, dan lain-lain.
8. Desa yang dikembangkan Pemerintah Kota Batu untuk wisata alternatif, yang memiliki potensi-potensi yang berbeda di setiap desa.
9. Infrastruktur yang terus dibenahi oleh Pemerintah Kota Batu untuk menunjang dan mendukung kegiatan wisata.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan jika faktor pendukung terpenuhi maka akan memudahkan masyarakat untuk mengikuti program pemberdayaan masyarakat yang ada. Banyak potensi desa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maka akan dapat membenahi kondisi ekonomi masyarakat Desa Oro-Oro Ombo. Banyak sekali potensi objek wisata yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pundi-pundi penghasilan dan dapat mengasah kemampuan masyarakat dalam pengelolaan, sehingga secara perlahan sumberdaya manusia dapat berkembang dan bisa memajukan desa.

b. Faktor Penghambat

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah.

Hariandja (2002:02) memaparkan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan disamping faktor yang lain seperti modal. Oleh karena itu Sumber daya manusia harus dikelola secara maksimal sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Kualitas Sumber daya manusia yang ada di Desa Oro-Oro Ombo masih kurang memadai dalam menjalankan program-program pemerintah. Dalam hal ini yang dirugikan adalah masyarakat sendiri.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa jika kualitas sumberdaya manusia masih rendah, maka akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Desa Oro-Oro Ombo. Mengingat sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam sebuah organisasi maka dipandang perlu upaya yang harus dilakukan aparat desa dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar bisa semakin maju dan berkembang dengan memanfaatkan potensi yang ada.

2. Sarana dan Prasarana kurang memadai

Dari hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa komponen sarana prasarana di Desa Oro-Oro Ombo masih kurang memadai. Hal tersebut dapat mempengaruhi program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, program menjadi berjalan secara lambat atau hasil yang di peroleh tidak sesuai dengan keinginan. Contohnya produktivitas di bidang UMKM menjadi rendah.

Dari Uraian di atas, dapat diketahui jika sarana dan prasarana masih kurang dalam pengembangan masyarakat sehingga hasil pelaksanaan program tidak maksimal. Karena sarana dan prasarana merupakan media yang mendukung tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang prinsip pelayanan publik yaitu kenyamanan. Sementara ini ketersediaan sumberdaya yang lain/sarana prasarana belum cukup memadai, masih perlu adanya peningkatan fasilitas fisik serta kelengkapan sarana dan prasarana demi peningkatan hasil program-program pemerintah.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa jika sarana prasarana dalam pemberdayaan masyarakat di tingkatkan sesuai kebutuhan, maka akan dapat mempercepat proses pelaksanaan sehingga lebih efisien, meningkatkan produktivitas, dan menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan UUD No. 6 tentang tahun 2014 Desa, Dalam Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oro-Oro Ombo dalam Pemberdayaan Masyarakat, program yang dilakukan sudah cukup baik sehingga dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya

Manusia. Upaya yang dilakukan oleh aparat desa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan menerapkan berbagai program yaitu :

- a. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur
- b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- c. Bidang UMKM
- d. Bidang Penanaman Modal BUMDES

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan masyarakat yaitu:

- a. Faktor Pendukung: Potensi alam yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan dukungan dari aparat berupa tersedianya fasilitas dan bantuan promosi produksi akan memudahkan untuk keberhasilan program pemberdayaan masyarakat
- b. Faktor Penghambat: Kualitas Sumber Daya Manusia masih rendah dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mengurangi hasil produktif

Demikian program program yang direncanakan oleh Desa Oro-Oro Ombo, semoga Allah SWT memberikan ridho sehingga setiap komponen pemerintahan dan masyarakat Desa Oro-Oro Ombo dapat bersatu merealisasikan program sesuai dengan yang direncanakan menuju Oro-Oro Ombo makmur dan sejahtera.

B. Saran

Sebagai salah satu tanggungjawab aparat desa dalam pengelolaan dana desa Oro-Oro Ombo, maka harus bisa mendekatkan diri kepada masyarakat dan memberikan arahan kepada masyarakat tentang dana yang dialokasikan untuk desa secara transparan dan mengadakan program yang lebih baik lagi dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Sarana dan prasarana juga harus disesuaikan dengan kebutuhan desa dan juga dapat menunjang program pemberdayaan masyarakat agar dapat berjalan sesuai harapan. Sehingga dapat memajukan ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- Aziz, Moh Ali dkk. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi dan Metodologi*. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara
- Bogdan & Taylor. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh Arief Furcha. Surabaya: Usaha Nasional
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press

- Goggin, Malcolm L et al. 1990. *Implementation, Theory and Practice: Toward a Third Generation*. Scott, Foresmann and Company: USA
- Hasibuan, Malayu S.P. 2000. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Gunung Agung
- Hayat, & Daris Zunaida. 2018. *Kemandirian Desa*. Malang: Inteligensia Media
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo, 1984. *Desa*, Balai Pustaka: Jakarta
- Kirk, J. & Miller, M. L., 1986. *Reliability and Validity in Qualitative Research*, Beverly Hills, CA, Sage Publications
- Lofland, John & Lyn.H.Lofland. (2006). *Analyzing Social Settings*. California: Wardsworth Publishing Company.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- Moleong, Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Notoatmodjo, Soekidjo. 1992. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Publik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Paul H. Landis, 1948. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, PT. Gramedia Pustaka Umum
- Roucek dan Warren. 1984. *Pengantar Sosiologi* (diterjemahkan: Sahat Simamora). PT. Bina Aksara. Jakarta.
- Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Gadjah Mada University Press. 1999. Yogyakarta
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press. Buku
- Spradley, J.P. 1980. *The Participant Observations*. New York: Reinhart & Winston
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet
- Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. Journal Administration and Society.